

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2024 kini telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dimulai dari Bulan Januari hingga akhir triwulan II ini. Hasil penghitungan inflasi tersebut sangat bermanfaat bagi Tim TPID Kabupaten Bandung agar dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dalam upaya mengendalikan inflasi, mengingat sebelumnya Kabupaten Bandung mengikuti pergerakan nilai inflasi dan IHK Kota Bandung. Komoditas Penyusun Inflasi Kabupaten Bandung yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bandung diantaranya:

| Kelompok/Subkelompok jenis barang dan jasa | Total |
|---|--------------|
| Makanan, minuman dan tembakau | 1,06 % |
| Penyediaan makanan dan minuman restoran | 0,46% |
| Perawatan pribadi dan jasa lainnya | 0,30% |
| Pakaian dan alas kaki | 0,22% |
| Kesehatan | 0,12 % |
| Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga | 0,05 % |
| Rekreasi dan olah raga | 0,05 % |
| Pendidikan | 0 % |
| Transportasi | -0,04 % |
| Informasi, komunikasi & jasa keuangan | -0,05% |

Sepanjang Bulan Juli hingga September 2024 Inflasi Kabupaten Bandung memiliki tren yang cenderung menurun secara berurutan dengan nilai *year on year* (yoy) sebesar 2,34%, dan 2,30% dan 2,28%, sementara di bulan Juli Kabupaten Bandung mengalami inflasi bulanan (*month to month*) sebesar 0,20% dan mengalami deflasi pada bulan Agustus dan September sebesar 0,13% dan 0,20%. Nilai tersebut sesuai dengan target dari nilai inflasi yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang menginstruksikan agar nilai inflasi Kabupaten dan Kota berada dalam rentang 1,5% hingga 3,5% pada nilai inflasi *year on year*, namun pada perhitungan *Month to month* deflasi terjadi selama dua bulan berturut-turut. Tingkat inflasi yoy Kabupaten Bandung stabil namun terjadi deflasi dua bulan berturut-turut, hal tersebut dikhawatirkan merupakan indikasi penurunan daya beli dan pertumbuhan perekonomian yang menurun yang dicerminkan dari beberapa komoditas pangan yang harganya menurun. Adapun *volatile goods* yang menyumbang inflasi selama Triwulan III 2024 ini adalah cabai merah, bawang sumenep, tomat, air kemasan, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, bawang merah. Yang menjadi tantangan pada Bulan Juli sampai dengan September 2024 ini adalah akan datangnya musim kemarau yang berpotensi menimbulkan gagal panen dan mengurangi supply pangan di pasar sehingga terjadi peningkatan nilai inflasi. Kekeringan tersebut bukan hanya dialami oleh Negara Indonesia, melainkan negara lain di Asia Tenggara yang biasa menjadi negara pengekspor beras tujuan Indonesia juga mengalami masalah kekeringan sehingga akan ada potensi negara-negara tersebut tidak dapat memenuhi kekurangan beras di Indonesia.

Adapun beberapa pasokan di Kabupaten Bandung berdasarkan data dari Provinsi Jawa Barat, membutuhkan pasokan dari luar daerah Jawa Barat seperti kedelai (impor dari Cina dan

Brazil), bawang merah (dari berebes dan Jawa Timur), bawang putih impor dari Cina, cabai rawit (dari Jateng dan Jatim), gula pasir (Sumsel, Lampung), minyak goreng (dari Riau, Jambi, Sumatera dan Kalimantan) sehingga akan lebih efektif jika ada kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan komoditas pangan. Meningkatkan nilai inflasi yang disebabkan oleh *demand pull inflation* pada komoditas tertentu seperti Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Cabai Merah, Bawang Merah dan Beras. Oleh sebab itu TPID Kabupaten Bandung terus melakukan upaya 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) agar inflasi tetap terkendali.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Mengingat nilai konsumsi Kabupaten Bandung berada di posisi ke-2 terbesar di Provinsi Jawa Barat, satu posisi setelah Kota Bekasi ditambah dengan jumlah populasi terbesar ke-2, maka dalam upaya pengendalian inflasi Kabupaten Bandung diperlukan upaya yang ekstra dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bandung agar ketersediaan pasokan pangan terpenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan yang akan memicu kenaikan inflasi terutama untuk 12 komoditas kebutuhan pokok. Menanggulangi hal tersebut upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemkab Bandung adalah membuat Lumbung Pangan Masyarakat, meningkatkan CPP Pemerintah, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk *shock absorber* terhadap dampak inflasi yang ditujukan kepada masyarakat miskin ekstrim terdampak inflasi, serta kelancaran distribusi pangan dan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Bandung senantiasa berupaya menjaga agar inflasi Kabupaten Bandung tetap stabil pada target rentang inflasi antara 1,5% hingga 3,5% sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024. Target tersebut diupayakan melalui upaya Pemda untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran Bahan Pokok (*volatile good*) yang menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi Kabupaten Bandung dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut dituangkan kedalam program kerja TPID Kabupaten Bandung diantaranya:

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Keterjangkauan Harga

Program Kerja

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagai Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Gelar pangan murah sebagai program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan sebagai program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Ketersediaan Pasokan

1. Melakukan Fasilitasi Lumbung Pangan sebagai program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Fasilitasi Bibit Komoditas rentan inflasi seperti Bawang Merah, Padi dan Cabai Merah
3. Pengembangan budi daya ayam, itik, puyuh petelur, itik pedaging dan sapi perah
4. Pengembangan bawang merah, cabai merah dan sarana prasarana produksi lainnya
5. Monitoring stok bahan pokok penting di pasar
6. Melaksanakan pengembangan usaha pangan masyarakat

Kelancaran Distribusi

Melaksanakan monitoring dan pengawasan angkutan barang

Komunikasi Efektif

Melaksanakan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN melalui rapat koordinasi, capacity building maupun konsultasi, monitoring stok bapokting di pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan Monitoring harga-harga kebutuhan dan evaluasi secara langsung maupun melalui aplikasi yang datanya di isi oleh unomerator yang berada di tiap tiap pasar yg berada di wilayah kabupaten Bandung. Data yang di peroleh dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan.
- Telah dilaksanakan Gelar Pangan Murah sebanyak 22 kegiatan.
- Telah melaksanakan monitoring evaluasi harga dan ketersediaan stok pangan sebanyak 3 kegiatan.
- Pengadaan Cadagnan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 171.5 ton.
- Telah melaksanakan fasilitasi benih padi dan bawang merah sebanyak 31.640 kg.
- Telah melaksanakan 3 kali monev sibapokting di tingkat kabupaten
- Pelaksanaan penyuluhan pertanian untuk pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa sebanyak 902 kali.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitasnya di rentang 1,5% hingga 3,5% menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri, Tim TPID Kabupaten Bandung dapat mengimplementasikan beberapa strategi:

1. **Pemantauan Pasar:** Tim TPID harus terus memantau kondisi pasar secara cermat, khususnya terkait dengan kenaikan permintaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dengan pemantauan yang cermat, mereka dapat mengantisipasi perubahan-perubahan harga yang signifikan.
2. **Stok Cadangan:** Membangun stok cadangan bahan pokok yang cukup di daerah

tersebut sebelum memasuki periode peningkatan permintaan dapat membantu mengurangi fluktuasi harga. Hal ini memungkinkan untuk menghadapi lonjakan permintaan tanpa harus mengandalkan impor yang mungkin mengalami keterlambatan atau hambatan lainnya.

3. **Mitigasi Bencana Kekeringan:** Berdasarkan data dari BMKG Indonesia, Kabupaten Bandung pada Bulan September Tahun 2024 ini akan menghadapi musim kekeringan dan yang akan menimbulkan gagal panen. Hal tersebut harus dapat dimitigasi agar tidak terjadi kelangkaan supply pangan yang diakibatkan oleh bencana kekeringan.
4. **Pemantauan Distribusi Pupuk Bersubsidi**